



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Plj, tanggal 22 Agustus 2019, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Plj;

Setelah membaca berkas perkara perdata gugatan sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Plj, dalam perkara gugatan antara :

I. **PENGUGAT**

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk SUNGAI DAREH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ersanky, Sp Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Dharmasraya;
2. Chandra Harmel Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Sungai Dareh;
3. Hengki Ternando Mantri PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Sungai Dareh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Juli 2018 pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Padang yang beralamat di Padang, yang mana terhadap Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2018 tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Register Nomor 32/SK/Pdt/GS/PN Plj tanggal 22 Agustus 2019 Untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

Lawan:

1. Nama : **Hasnimar**;
Tempat Tanggal lahir : Padang Hilalang, 18 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Jorong Sialang Nagari Gunung Selasih
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten
Dharmasraya;
Pekerjaan : Dagang;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HP :
2. Nama : **Hengki**;
Tempat Tanggal lahir : Sialang, 22 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Jorong Sialang Nagari Gunung Selasih
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten
Dharmasraya;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Nomor HP :

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut PARA TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah menentukan gugatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana, hal mana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan di Pasal 3 dan Pasal 4 (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (3) (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan :

(1) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 4 Ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan :

(3a) Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Dari Pasal tersebut diketahui bahwa pada prinsipnya gugatan yang termasuk gugatan sederhana adalah mengenai domisili atau tempat tinggal antara Penggugat atau kuasanya dan Tergugat harus di daerah hukum pengadilan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama. Maka Hakim harus menilai apakah antara Penggugat atau kuasanya dengan Tergugat berada di daerah hukum Pengadilan yang sama?;

Menimbang, bahwa pertanyaan berikutnya adalah dari mana Hakim dapat menilai Penggugat atau kuasanya dan Tergugat berada di daerah hukum Pengadilan yang sama, dimana secara formalitas suatu gugatan hal tersebut wajib ditentukan dalam perkara perdata gugatan sederhana, sehingga satu-satunya bagi Hakim dalam menilai apakah para pihak di daerah hukum Pengadilan yang sama adalah dalam gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya/Karyawan bernama 1. Ersanky dengan jabatannya sebagai Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Dharmasraya, 2. Chandra Harmel dengan jabatannya sebagai Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Sungai Dareh, 3. Hengki Tornando dengan jabatannya sebagai Mantri PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Sungai Dareh berdasarkan surat kuasa tertanggal 08 Juli 2019, pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, di Padang yang beralamat di Padang, sedangkan Tergugat 1. Hasnimar dan Tergugat 2. Hengki bertempat tinggal di Jorong Sialang Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, terhadap kuasa dari Penggugat tidak tertera secara jelas tempat tinggal/domisili dari Kuasa Penggugat, dan hanya mencantumkan jabatan Kuasa Penggugat saja, walaupun dalam prateknya menurut Buku M.Yahya Harahap,SH dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* dalam materi pembahasan perihal Formulasi Surat Gugatan halaman 53 pada poin Identitas Para Pihak menyatakan bahwa *"Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali, tidak seperti diisyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka)"*, dimana tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut meliputi nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan penyebutan identitas lain, tidak imperatif.

Menimbang, bahwa walaupun terhadap identitas para pihak dalam gugatan dapat dibuat secara sangat sederhana akan tetapi mengenai tempat

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal/domisili para pihak dalam Gugatan Sederhana sangatlah penting kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa dengan hanya dicantumkan jabatan dari Kuasa penggugat tanpa tertera dengan jelas mengenai tempat tinggal/alamat dari Kuasa Penggugat dan kemudian atas kuasa tersebut tertera merupakan kuasa substitusi dari direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Padang yang beralamat di Padang;

Menimbang, bahwa dengan hanya merujuk pada jabatan kuasa Penggugat tersebut tidak ada kepastian atas gugatan Penggugat, mengenai apakah Kuasa Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, selain itu dalam gugatannya penggugat menyatakan mendapatkan kuasa substitusi dari Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Padang yang beralamat di Padang yang secara jelas bukan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 4 Ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret gugatan Penggugat dalam register perkara perdata gugatan sederhana;`

Menimbang, bahwa oleh karena itu juga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dan sisa dari panjar biaya perkara gugatan Penggugat tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (3), 4 Ayat (3a), Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Plj dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di : Pulau Punjung

Pada tanggal : 28 Agustus 2019

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

KHAIRUL, S.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS

S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pengadaan ATK.....	Rp 75.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
4. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp121.000,00
(Seratus dua puluh satu ribu rupiah);	